

BAB III

PELAKSANAAN KOLONISASI DI BELITANG

Bab ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan kolonisasi di Belitang. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut, penulis akan menjabarkan sejarah kolonisasi yang ada di provinsi Sumatra Selatan terlebih dahulu. Ada beberapa penjelasan yang harus di tuangkan kedalam bab ini. Setelah itu, penulis juga akan membahas awal mula pelaksanaan kolonisasi di Belitang pada tahun 1937. Bagaimana pelaksanaannya sampai kedatangan awal ke Belitang.

A. Latar Belakang Kolonisasi di Sumatra Selatan

Sumatra Selatan merupakan provinsi yang luas dengan keanekaragaman suku dan budaya yang sangat beragam. Dalam arus sejarah, Sumatra Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mejadi tempat kolonisasi semasa pemerintah Hindia Belanda. Ada beberapa wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan kolonisasi yakni Tugumulyo di kabupaten Musi Rawas, dan Belitang di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sejak tahun 1930 terjadi arus perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa melalui kolonisasi terjadi secara besar-besaran.

Peserta harus benar-benar petani, sebab jika bukan dapat menyebabkan ketidakberhasilan di lokasi Kolonisasi. Fisik harus kuat agar bisa bekerja keras. Muda agar dapat menurunkan fertilitas di pulau Jawa. Sudah berkeluarga untuk menjamin ketertiban di lokasi baru. Tidak memiliki anak kecil dan banyak anak karena akan menjadi beban. Bukan bekas kuli kontrak karena dianggap sebagai provokator yang akan menimbulkan keresahan di pemukiman baru. Harus waspada terhadap “perkawinan Transmigran” sebagai sumber keributan, Jika wanita tidak sedang hamil karena diperlukan tenaganya pada tahun-tahun pertama bermukim di tempat baru. Jika bujangan harus menikah terlebih dahulu di Jawa karena dikhawatirkan mengganggu istri orang lain, Peraturan tersebut tidak berlaku jika seluruh masyarakat desa ikut Kolonisasi (Pelzer,1945:210).

Selanjutnya, jika syarat sudah terpenuhi maka para kolonis diberangkatkan dari Jawa ke Sumatra Selatan. Keberangkatan ini merupakan awal dari pelaksanaan kolonisasi. Kolonisasi banyak diselenggarakan untuk mendapat tenaga kerja murah bagi perusahaan swasta di luar Jawa, sedangkan program kolonisasi diselenggarakan untuk pemerataan penduduk dan pembangunan di luar Jawa. Pada masa Kolonial Belanda hasilnya adalah untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya yang diperoleh dari usaha dan kerja keras buruh yang dibayar dengan murah.



Gambar 3. Pendataan Peserta Kolonisasi (Mr. C. C. J. Massen: 1937:27)

Kolonisasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal atas inisiatif pemerintah Hindia Belanda, dan telah menjadi program yang sudah diimplementasikan sejak dari tahun 1905. Tidak ada satu Pengertian yang lebih spesifik, kolonisasi adalah kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk memindahkan penduduk dari pulau Jawa yang berpenduduk padat ke wilayah lain yang berpenduduk jarang di luar Pulau Jawa. Namun demikian, tujuan kolonisasi yaitu kebeberapa pulau di seluruh Hindia Belanda seperti pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

1. Kolonisasi Pasemah (Basemah)

Kolonisasi pertama di Sumatra Selatan (Keresidenan Palembang) terdapat di Lintang, terletak didaerah Pasemah (Besemah). Kolonisasi ini didirikan pada tahun 1919. Akan tetapi usaha untuk membangunnya menemui kegagalan, sehingga dalam tahun 1922 terpaksa ditutup dan para kolonis (pioneer/penduduk baru/warga) dikirim kembali ke Jawa. Pengembalian ini dilakukan karena adanya ketidak sesuaian target yang dicapai oleh buruh pabrik di Pasemah. Target itu merupakan dari pemulihan perekonomian negeri Hindia Belanda akibat dampak depresi ekonomi pasca Perang Dunia I.

Pemerintah menerima usul yang menggiurkan itu, dan pada tahun 1920 kolonisasi dimulai. Mereka tahu bagaimana cara sirik beberapa orang miskin di Jawa, dan karena mereka pasti pernah mendengar bagaimana seorang lauke di topi dengan gondola pada mantra, mereka pergi ke Sumatra Selatan untuk membantu negara pulih. Ada 62 laki-laki, 140 perempuan dan 186 anak-anak (Het Nieuws Van Den Dag, 1922: 5) .

Kolonisasi pertama di Provinsi Sumatra Selatan yaitu berada di Lintang tepatnya di daerah Pasemah. Pemukim baru datang ke Pasemah pada tahun 1920 untuk membantu dipekebunan milik pemerintah Hindia Belanda di Lintang.

Hal ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian negeri Hindia Belanda akibat dampak depresi ekonomi pasca Perang Dunia I. sebanyak 62 Laki-laki, 140 Perempuan dan 186 anak pergi dari Jawa ke Pasemah.

Sebenarnya kolonisasi ini bukan tujuan dari pemerintah Hindia Belanda di Pasemah. Hal ini hanya untuk memberikan tenaga kerja bagi perkebunan-perkebunan Hindia Belanda di sana. Dengan adanya bantuan tenaga pekerja diharapkan dapat membantu di perkebunan itu.

2. Kolonisasi Kampung, Kota Pagar Alam

Pada tahun 1920 pemerintah Hindia Belanda menerima usulan yang bagus Kolonisasi (permukiman) kedua adalah yang disebut “kolonisasi kampung” terletak di daerah onderneming Pagar Alam (sekarang Kota Pagar Alam). Permukiman baru dibangun oleh bekas buruh onderneming-onderneming (perusahaan perkebunan teh/kopi) yang sudah habis kontraknya. Tiap keluarga mendapat sebidang tanah dan sebuah rumah kecil (sederhana) dari perusahaan. Mereka bebas mengerjakan dan mengolah lahan yang didapat, akan tetapi warga diwajibkan dalam waktu panen kopi (\pm 4 bulan), bekerja untuk perusahaan perkebunan kopi dengan gaji standar perusahaan.

Perusahaan ini juga saat ini bergerak dalam penanaman kina 200 bahoe di Gunung Agung di lereng Selatan sampai ke Dempo. Mereka memiliki lahan yang indah disana diketinggian dari 4100 hingga 5000 Mdpl. Dan pekerja awal ditangani dengan penuh semangat, kemajuan yang sangat bagus. Saya pergi ke sana sekali. Kantor divisi (Onderneming) ada di jalan dalam dari Pagar Alam ke Tanjung Sakti (di Bencoolen), dan mampu meyakinkan saya bagaimana orang baik di sana dalam waktu singkat (waktu telah berkembang). Sudah banyak kampung untuk bekerja orang (Jawa); dalam konstruksi dan ruang kerja pengaliran air dengan persyaratan kebersihan diperhitungkan (de Deli Courant, 1922: 5).

Dalam tahun 1929 jumlah penduduk pada “kolonisasi kampung” di onderneming Pagar Alam yang tercatat sebanyak 214 orang, Onderneming (Perusahaan Perkebunan) menunjuk seorang pensiun Sersan yang berasal dari suku Ambon sebagai Kepala Desa.



Gambar 4. Gedung Pabrik Teh Gunung Dempo di Kawasan Pertanian Pagar Alam (KITLV 18535: 1930)

Kolonisasi kampung merupakan permukiman baru orang dari Pulau Jawa ke Pagar Alam. Mereka pergi untuk bekerja di perkebunan-perkebunan milik pemerintah Hindia Belanda di selatan Gunung Agung sampai ke Gunung Dempo. Lahanya diketinggian 4100 sampai 5000 Mdpl. Pekerja awal yang merupakan pemukim baru di tangani sangat baik oleh pemerintah Onderneming Pagar Alam yang berkantor di Jalan Tanjung Sakti menuju kearah Bengkulu.

Seiring dengan kemajuan waktu, sudah banyak kampung-kampung orang Jawa di Pagar Alam. Kontruksi dan system pengairan untuk pemukim baru diperhatikan oleh pemerintah Onderneming Pagar Alam. Kemajuan ini ditambah lagi dengan syarat menjaga kebersihan lingkungan disekitar kolonisasi.

3. Kolonisasi Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas

Selain di Pasemah dan Pagar Alam, kolonisasi di Sumatra Selatan terjadi juga di Lubuk Linggau dan Belitang. Dalam tujuan kolonisasi jika di pasemah dan Pagar Alam mereka di pekerjakan dalam perkebunan-perkebunan milik pemerintah Hindia. Hal ini berbeda dengan kolonisasi di Lubuk Linggau dan Belitang.

Pelopor daerah baru. Kami melaporkan beberapa waktu yang lalu bahwa tahun ini pemukim Pribumi pertama akan dikirim ke daerah kolonisasi baru di Sumatera, yaitu. Loeboek Linggau, di terminal Kereta Api Sumatra Selatan, dan Belitang. Kita sekarang mengetahui bahwa pengiriman orang Jawa ke Loeboek Linggau sudah akan dilakukan bulan depan. 600 keluarga akan dikirim ke situs baru ini. Pengiriman KK ke Belitang (ditetapkan 250) akan dimulai Agustus (de Locomotief, 1937:9)

Koran de Lokomotif menjadi surat kabar dalam berita kolonisasi di Sumatra Selatan khususnya wilayah Lubuk Linggau dan Belitang. Dalam berita tersebut melaporkan bahwa akan ada pengiriman penduduk dari pulau Jawa ke daerah Sumatera yakni Lubuk Linggau yang berada di ujung stasiun Kereta Api Sumatra Selatan dan di Belitang.

Pengiriman pemukim baru untuk daerah Lubuk Linggau dilakukan bulan depan, yakni sebanyak 600 keluarga akan di kirim ke pemukiman baru ini. Sedangkan untuk wilayah Belitang, akan di kirim sebanyak 250 KK yang akan di bulan Agustus. Tahun 1937 merupakan masa awal dimana kolonisasi di Sumatra Selatan Berlangsung. Pelaksanaan progam terjadi di dua tempat yang berbeda yakni di Lubuk Linggau dan Belitang.



Gambar 5. Pemukim Jawa di Kolonisasi Tugumulyo (Pelzer, 1945: 182)

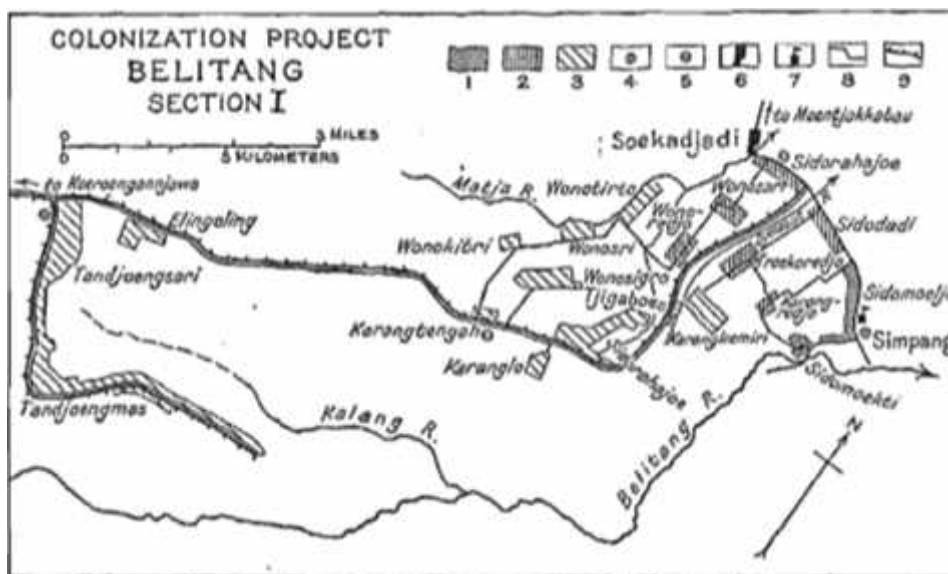
Baru pada tahun 1937 Pemerintah Kolonial Belanda memulai kolonisasi baru di Karesidenan Palembang (Sumatra Selatan) yang lebih terprogram dengan ditempatkan sebanyak 250 keluarga. Berbarengan dengan itu ditempatkan juga 600 keluarga (1.969 jiwa) di daerah Tugumulyo (Tugu Mulyo) yang berada dekat dengan Kota Lubuk Linggau.

Penyelenggaraan kolonisasi di Provinsi Sumatra Selatan dimulai pada zaman Kolonial Belanda (1937–1940) yang dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi yaitu Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas. Pada awal pelaksanaan kolonisasi tahun 1937, Belitang dipilih karena daerahnya datar dilewati aliran Sungai Komering sehingga dimungkinkan untuk dibuat irigasi. Daerah Kolonisasi Belitang saat itu direncanakan dapat menampung 30.000 keluarga.

B. Awal Masuknya Kolonisasi di Belitang

Perpindahan penduduk merupakan bentuk mobilitas sosial yang secara terus menerus berjalan. Dalam sejarah perpindahan penduduk di Indonesia terkhusus masa pemerintahan Hindia Belanda sudah ada sejak 1 abad yang lalu. Perpindahan penduduk ini di namakan sebagai kolonisasi. Keberlangsungan kolonisasi tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda sebagai penyelenggara pelaksanaannya.

Kolonisasi di Indonesia terjadi pada wilayah-wilayah tertentu. Baik itu di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, maupun di Indonesia Bagian Timur. Di Sumatera, kolonisasi terjadi di berberapa daerah seperti di Lampung, Bengkulu, Deli Serdang, Lubuk Linggau dan Belitang.



Gambar. 6 Peta Kolonisasi Belitang (Pelzer, 1945: 215).

Pada awal pelaksanaan kolonisasi tahun 1937, Belitang dipilih karena daerahnya datar dilewati aliran Sungai Komering sehingga dimungkinkan untuk dibuat irigasi. Selain itu tanah di Belitang cocok untuk di gunakan sebagai lahan tanaman pangan karena memiliki kontur yang baik. Hal ini menjadi beberapa pertimbangan untuk meletakkan para kolonis di wilayah Belitang.

Praktek kolonisasi merupakan buah dari politik etis yang di gaungkan yang berisikan kolonisasi, irigasi, dan edukasi. Setelah adanya kolonisasi yang dilakukan di berbagai wilayah di Hindia Belanda seperti, kolonisasi Bagelen, Sukadana, Lubuk Linggau, dan Belitang. Setiap tempat yang dijadikan sebagai

daerah kolonisasi memiliki potensi tersendiri untuk selanjutnya ditempati oleh para kolonis.

Kolonisasi baru, berita dari Cilacap minggu depan pengangkutan pemukim ke daerah kolonisasi Belitang di Palembang akan berangkat. Pemukim berasal dari Banyumas, sebanyak 70 KK terdiri dari 302 jiwa dan beberapa ratus dari daerah sekitar. (Algemeen Handelsblad, 1940:3)

Berita terbaru dimuat dalam surat kabar Algemeen Handelsblad yang berisikan info tentang kolonisasi berlangsung. Dari berita tersebut termuat bahwa berita dari Cilacap mengabarkan minggu depan pengangkutan pemukim ke daerah kolonisasi Belitang di Keresidenan Palembang. Para pemukim baru berasal dari daerah Banyumas, Jawa Tengah. Pindahan pemukim berjumlah 70 KK terdiri dari 302 jiwa dan beberapa ratus dari daerah sekitarnya.

Bagan 3. Rekrutmen Kolonisasi Di Belitang



Periode kolonisasi menjadi perbincangan hangat media masa Hindia Belanda pada masa itu.. hal ini terjadi karena pelaksanaannya terjadi secara terus-menerus untuk pemukiman baru di beberapa lokasi yang sudah disediakan. dengan adanya progam kolonisasi diharapkan orang pribumi dapat mendapatkan pekerjaan atau menjadi pekerja di kebun-kebun milik pemerintah Hindia Belanda di Sumatera. Selain itu, dengan adanya kolonisasi diharapkan mengurangi dampak kepadatan penduduk di Pulau Jawa.

Permukiman ini dinamai Marga Belitang dan masih banyak lagi beberapa marga. Kolonisasi ini area akan berjumlah sekitar 30.000 dapat berisi kalimat dan Rencana rinci Tuan Vissers sekarang terlibat divisi departemen Administrasi Dalam Negeri dan Komisi Kolonisasi sedang dipelajari (Deli Courant, 1939:10).

Permukiman baru di Onderafdeling Komering Ulu diberi nama Belitang. Ini merupakan marga termuda diantara marga-marga yang ada di sini. Kolonisasi ini diperkirakan akan menampung sebanyak 30.000. hal ini didapat dari rincian rencana Tuan Vissers yang merupakan pejabat Disvisi Departemen Administrasi Dalam Negeri Dan Komisi Kolonisasi yang sedang dia pelajari. Rencana ini akan terus berkembang sampai pelaksanaan kolonisasi di Belitang berlangsung.

Area kolonisasi di Belitang merupakan wilayah yang luas dan dapat menampung para pemukim baru dengan cara berkelompok. Sesuai dengan keadaan wilayah yang masih hutan lebat maka diperlukan pembukaan lahan berlanjut untuk pelaksanaan sebuah kolonisasi.

Daerah kolonisasi di Belitang terletak di Onderafdeling Komering Oeloe, Afdeling Ogan dan Komering Oeloe, Residen Palembang di laksanakan pada tahun 1937. Pemukim pertama tiba pada tanggal 17 Agustus tahun itu. Kolonisasi ini mengikuti sistem pemukim yang terpencar-pencar yang memiliki keuntungan sangat besar yaitu pada waktunya pendatang baru akan segera menemukan mandornya di desa tempat mereka akan menetap. Dengan demikian, mereka dapat memanen pada jarak yang kecil dari pekarangan dan lahan bangunan sehingga setelah panen selesai, mereka tidak perlu diangkut jauh-jauh ke lokasi pemukiman akhir (de Indische Courant, 1940:5).

Kolonisasi Belitang berada di pemerintah Onderafdeling Komering Ulu, Afdeling Ogan dan Komering Ulu Keresidenan Palembang. Berada di ujung perbatasan antara Keresidenan Palembang dengan Keresidenan Lampung. Pemukim pertama datang pada tanggal 17 Agustus 1937. Kolonisasi ini bersistem pemukiman terpencar yang memiliki keuntungan sangat besar yaitu ketika pendatang baru akan menemukan mandornya di desa tempat mereka akan menetap.

Dengan cara seperti ini, diharapkan pemukim baru akan memanen dan menjual hasil ditempat mandor tanpa mengumpulkan ke tempat lokasi pemngumpulan terakhir. Rencana ini bertujuan agar setelah panen para petani tidak susah payah pergi jauh ke pengepul untuk menjual hasil tanamannya. Di pinggiran, serta di pusat kolonisasi ada banyak kolam dan lubang, dibuat selama penebangan dan menebang pohon; di banyak tempat berada di medan depresi daerah rawa, di mana air menggenang.

C. Reaksi Masyarakat Setempat

Sumatra Selatan merupakan daerah yang luas dengan keberagaman masyarakatnya. Letak geografis juga mempengaruhi budaya dan kesukaan di setiap daerah di Sumatra Selatan. Selain penduduk asli di Sumatra Selatan juga

terdapat penduduk pendatang. Ada beberapa suku yang datang ke provinsi Sumatra Selatan dan salah satunya yaitu dari pelaksanaan kolonisasi.

Sebelum adanya kolonisasi penduduk atau perwakilan marga akan bersepakat dengan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan baik bagi penduduk asli maupun pendatang ketika kolonisasi sudah berjalan. Masyarakat di Belitang merupakan berasal dari suku Komerling yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Mereka tinggal dengan menganut sistem marga. Sistem inilah yang membagi perkampungan-perkampungan suku komering di Belitang.

Negosiasi yang dilakukan ditingkat daerah antara pemerintah daerah dan wakil marga yang bersangkutan, menentukan batas pengembangan penempatan migran. Karena sangat rendah kepadatan penduduk dibagian selatan sumatera (12 jiwa per km) pada tahun '30-an, marga-marga menyerahkan banyak lahan luas dengan senang hati (Levang, 2003:131).

Kolonisasi di Belitang merupakan daerah di wilayah sumatera bagian selatan. Belitang masuk dalam pemerintahan OnderAfdeling Komerling Ulu yang berpusat di kota Martapura. Pemerintahan ini secara teratur sampai ke pemerintahan marga yang berada di Belitang. Sebelum melakukan pemindahan orang-orang dari pulau Jawa ke Belitang, terlebih dulu pemerintah yang bersangkutan bernegosiasi dengan pemerintah lokal yakni pemerintahan marga. Setelah di setuju selanjutnya dilakukannya kolonisasi di Belitang untuk tahap pertama.

Pemerintahan marga memberikan wilayahnya untuk dijadikan tempat kolonisasi yang nantinya dinamakan Belitang. Perwakilan marga dengan senang hati menyerahkan lahan yang luas untuk dijadikan sebagai tempat kolonis. Terkadang setiap anggota marga memperoleh sawah seluas dua bau (1 bahu sama dengan 0,71 ha) sebagai ganti rugi. Dengan menggiatkan transaksi semacam itu, pemerintah kolonial mengharapkan penduduk setempat meninggalkan praktik perladangan berpindah.

Wilayah di Belitang sangatlah strategis, yaitu berada di jalur sepanjang sungai Belitang dan memiliki tekstur tanah yang mendukung untuk dijadikan lahan pertanian nantinya. Unsur air yang melimpah sebagai sumber kehidupan sangatlah penting bagi masyarakat kolonisasi nantinya. Diharapkan dengan adanya letak geografis yang mendukung mampu membawa dampak yang baik bagi masyarakat pendatang.

D. Kebijakan Kolonisasi

Peraturan merupakan hal yang mendasar yang harus ditaati bersama untuk menciptakan sebuah kedisiplinan. Dalam pelaksanaan kolonisasi di Belitung juga tidak bisa lepas dari sebuah peraturan-peraturannya. Hal ini bertujuan untuk mendisiplinkan para calon kolonis maupun pemukim baru yang sudah sampai di Belitung. Peraturan ini merupakan langkah dari sebuah kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengatur jalannya kolonisasi di Belitung.

Kebijakan kolonisasi dibuat untuk meminimalisir sebuah kejadian merugikan baik bagi pemerintah Hindia Belanda, penduduk pribumi maupun pemukim baru dari Jawa. Kebijakan diterapkan ketika kolonis masih di pulau Jawa dan ketika sudah sampai ditempat tujuan. Sebelum melakukan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terlebih dahulu memberikan propaganda berupa pemutaran film tentang kolonisasi.

“Dari 2 Maret hingga 28 Maret, Film Kolonissi akan diputar diberbagai wilayah tersebut. Pertunjukan pertama akan berlangsung pada 2 Maret di Kawedanan Sleman dan dimulai pada pukul 8” (de Locomotief, 1939:14).

Propaganda ini merupakan langkah pemerintah Hindia Belanda dalam mengajak penduduk dari Pulau Jawa agar mengikuti program kolonisasi. Dengan pemutaran film diharapkan dapat mengurangi penduduk di pulau Jawa dan membuka lahan di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Pemutaran film ini dilakukan di Kawedanan Sleman, Yogyakarta pada jam 8.

Selain propaganda pemutaran film ada juga peraturan berupa syarat-syarat agar dipenuhi sebagai calon kolonis. Syarat ini bertujuan untuk mengsucceskan program kolonisasi. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pilih petani asli, non petani adalah beban bagi koloni dan membahayakan keberhasilannya.
2. Pilih orang yang kuat secara fisik; hanya mereka yang tahan menghadapi kesulitan merintis.
3. Pilih orang muda; dengan mengambilnya seseorang mengurangi peningkatan populasi di masa depan di Jawa.
4. Pilih keluarga; keluarga adalah fondasi perdamaian dan ketertiban di koloni.

5. Jangan memilih keluarga dengan banyak anak kecil; anggota yang bekerja dari keluarga tidak dapat memikul beban itu pada awalnya.
6. Jangan memilih mantan buruh perkebunan; dalam 90 persen dari semua kasus mereka adalah penyebab ketidakpuasan di koloni.
7. Jangan biarkan apa yang disebut perkawinan penjajahan; mereka adalah sumber keresahan dalam koloni.
8. Jangan menerima ibu hamil; pemukim perintis membutuhkan bantuan penuh dari istri selama tahun pertama.
9. Jangan menerima bujangan; cepat atau lambat mereka akan terlibat istri orang lain.
10. Izinkan desa atau kampung untuk bermigrasi secara keseluruhan; dengan mudahnya yang pertama sembilan perintah dapat diabaikan (Pelzer, 1945:210).

Syarat-syarat ini harus dipatuhi oleh calon kolonis yang akan ikut dalam program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda. Hal ini untuk meminimalisir kekacauan yang akan terjadi di tempat yang baru. Non petani hanya akan mengacaukan program kolonisasi yang pada dasarnya pengembangan lahan pertanian. Orang-orang yang lebih muda dipilih karena pada tahun-tahun awal sangat dibutuhkan tenaganya untuk membuka lahan baik pertanian maupun kampung.

E. Segi pedagogisnya

Pelajaran yang dapat diambil dari Kolonisasi di provinsi Sumatra Selatan pertama yaitu di daerah Pasemah tahun 1919. Mereka adalah para buruh perkebunan milik pemerintah Hindia Belanda dengan harapan untuk membantu memulihkan perekonomian pasca perang dunia I. Namun, pada tahun 1922 pemukiman baru ini mengalami kegagalan dan dipulangkan lagi penduduknya ke Jawa. Kemudian disusul oleh pemukiman kampung di Pagaram tahun 1920 yang kedua tempat ini memiliki tujuan pada sektor perkebunan milik Hindia Belanda. Pemukim baru datang lagi di wilayah yang berbeda, satu di dekat perbatasan dengan distrik Lampung, yaitu Kolonisasi Belitang tahun 1937. Yang satunya berada di ujung jalur kereta api yang berbatasan dengan distrik Bengkulu, yaitu Tugumulyo, Lubuk Linggau yang sekarang menjadi wilayah dari kabupaten Musi Rawas di tahun 1937.

Pelajaran yang dapat diambil awal masuknya kolonisasi di Belitang yaitu perjalanan dari pulau Jawa ke Belitang agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik di tanah Kolonisasi. Dengan adanya lahan garapan mereka diharapkan bisa mengerjakan dan menjadi hasil perekonomiannya.

Pelajaran yang dapat diambil dari Reaksi masyarakat pribumi di Belitang pada saat itu sifat keterbukaan antara suku komering dengan pemerintah Hindia Belanda akan program kolonisasi di wilayah Belitang. Reaksi masyarakat pribumi di Belitang pada saat itu menerima yang setiap wakil marga mendapat lahan pertanian yang nantinya dibuka oleh pemukim baru. Kolonisasi di Belitang merupakan wilayah di Onderaafdeling Komering Hulu yang berpusat di Martapura. Belitang sendiri merupakan tanah marga suku komering diantaranya yaitu Madang Suku 1, Madang Suku 2, Pemuka Bangsa Raja, Dan Semendawai Suku 3. Marga baru ini di namakan Belitang sesuai dengan daerah tempat yang akan di tinggali di sepanjang jalur sungai Belitang.

Pelajaran yang dapat diambil dari kebijakan kolonisasi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu melaksanakan salah satu program politik etis, contohnya emigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk pulau Jawa dan memperbaiki taraf kehidupan yang masih rendah. Pemilikan tanah yang makin sempit di pulau Jawa akibat pertambahan penduduk yang cepat telah menyebabkan taraf hidup masyarakat di pulau Jawa semakin menurun. Adanya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa.